

RINGKASAN

TITIS IZATIN, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Angkasa, S.H., M.Hum dan anggota Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.Hum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Serta Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan efektivitas perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan analisis data menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sudang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2000 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas yaitu berupa upaya hukum pembelaan diri dan upaya hukum banding adminitratif. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik belum efektif karena upaya hukum banding adminitratif belum dapat terlaksana, notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik belum mau menggunakan haknya berupa upaya hukum adminitratif karena sanksi yang diberikan dianggap ringan sehingga notaris tidak perlu untuk menggunakan haknya yang lain untuk melakukan upaya hukum adminitratif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pelanggaran Kode Etik.

SUMMARY

TITIS IZATIN, Notary Masters Program, Faculty of Law, Jenderal University Soedirman , LEGAL PROTECTION FOR NOTARY ALLEGED TO HAVE VIOLATED THE CODE OF ETHICS, Commission Advisor, Chairman Dr. Angkasa, SH, M.Hum and members Dr. Tedi Sudrajat, SH, M. Hum .

Article 1 point 1 of the Law Number 2 of 2014 amendment on Constitution Number 30 of 2004 concerning Position Notary Public mention that Notary Public is official authorized general For make deed authentic and own authority other as meant in Constitution This or based on Constitution other. As well as the Code of Ethics Notary Public as guidelines in operate position Objective from study This For know protection law for alleged notary do offender code ethics and effectiveness protection law for the notary did offender code ethics. Method research used is juridical sociological and data analysis using method qualitative based on results study showing that Protection law to alleged notary do violation code ethics already arranged in Constitution Position Notary and Code of Ethics Written notary in Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2000 concerning procedures inspection assembly supervisor that is form effort law defense self and effort administrative appeals law. Protection law to alleged notary do offender code ethics Not yet effective Because effort administrative appeals law Not yet can carried out , the alleged notary do offender code ethics Not yet Want to use right form effort law administrative Because sanctions given considered light so that Notary Public No need For use other rights to do effort law administrative .

Keywords : Legal Protection , Notary , Violation of the Code of Ethics .